

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Budiarjo, M. (1998). *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiarjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Conn, P. (1971). *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science*. New York: Harper & Row Publisher.
- Dahl, R. (1963). *Modern Political Analysis*. New York: Englewood Cliffs Prentice.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University.
- Djafar, T. M. (2018). *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- E.A, Z. (1986). *The Regulation of Political Conflict*. New York: Praeger.
- Easton, D. (1965). *System Analysis of Political Life*. New York: John Willey & Sons Inc.
- Kencana, I. (2003). *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jalal, A. (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Penjuru Ilmu.
- Jalal, A. (2022). *Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 dan Tahun 2021*. *Populis, Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 7, No. 2.
- Lasswell, H. (1972). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: The World Publication Comp.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosca, G. (1939). *The Rulling Class*. New York: Mc Graw-Hill.
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.
- Neumann, S. (1956). *Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics*. Chicago: University of Chichago.

Perwita, A. B., & Sabban, N. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, A. (1998). *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.

Rauf, M. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

### **JURNAL**

A. Mulyawan. (2017). Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014.

Fazila, R. (2017). Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017.

Meutya Viada Hafid. (2018. ). Konsensus Politik Dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016.

### **HASIL WAWANCARA**

Dr. Drs. Ganjar Razuni, S. (2023, Januari 20). Sekretaris Dewan Pakar Golkar.

Septivone, A. (2022, Desember 14). Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi Pihak Nofel Saleh Hilabi. (A. P. A.P, Interviewer)

Sukamto. (2023, Januari 4). Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi kubu Ade Puspitasari. (A. P. A.P, Interviewer)

### **SUMBER HUKUM**

*UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*

*Juklak No. 2 Tahun 2020*. (2020). Jakarta: Partai Golongan Karya.

### **SUMBER INTERNET**

*Agustus, Anggota DPRD Bekasi Terpilih Dilantik*. (2009, Juli 22). Retrieved from megapolitan.kompas.com:  
megapolitan.kompas.com/read/2009/07/22/21034886/~Megapolitan~News

*Rekapitulasi Suara KPU Kota Bekasi Selesai, PDIP Jadi Pemenang.* (2014). Retrieved from [beritasatu.com/news:beritasatu.com/news/179287/rekapitulasi-suara-kpu-kota-bekasi-selesai-pdip-jadi-pemenang](http://beritasatu.com/news:beritasatu.com/news/179287/rekapitulasi-suara-kpu-kota-bekasi-selesai-pdip-jadi-pemenang)



## LAMPIRAN

### BIODATA PENULIS



Nama : Afifadya Prilly Asmoro Puteri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 30 April 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Taman Bekasi Asri Blok F/No. 9, RT. 003/RW. 029, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia (17115)  
No. HP : 085813476059  
Email : [afifadyaprilly@gmail.com](mailto:afifadyaprilly@gmail.com)  
Pendidikan : SD Mutiara Baru  
SMP Negeri 2 Kota Bekasi  
SMA Negeri 6 Kota Bekasi

#### Pengalaman Kerja

Perusahaan	Periode	Jabatan
Askpert.id	Oktober 2022-Sekarang	Social Media and Event Specialist
Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Deputi I/Poldagri	April 2022-Juli 2022	Staff Magang di bagian Kesekretariatan dan Asisten Deputi 2 (Desentralisasi dan Otonomi Daerah)

#### Pengalaman Organisasi

Organisasi	Periode	Jabatan
Young On Top Bekasi	2021-2022	Vice President

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Kubu Nofel Saleh Hilabi

Nama	: Ibu Anneke Septivone
Jabatan/Instansi	: Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar Kota Bekasi
Hari/Tanggal	: Rabu, 14 Desember 2022
Pukul	: 11.45-12.30WIB

1. Apa yang mendorong Bpk. Nofel Saleh menyalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi? Dan bagaimana tanggapan dari internal partai itu sendiri?
2. Seperti kita ketahui bahwa terdapat dua calon dalam pemilihan Ketua Umum Golkar Kota Bekasi, sehingga menjadikan dua kubu. Sejak kapan terciptanya dua kubu tersebut? Dan bagaimana awal mulanya?
3. Apa yang melatarbelakangi terselenggaranya dua kali Musda V di tempat yang berbeda?
4. Bagaimana jalannya Musda V di Hotel Horisson? Dan bukti seperti apa yang mendukung kevaliditas kepemimpinan Bpk. Nofel Saleh sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi?
5. Pasca Musda V, langkah seperti apa yang akan maupun sudah dilakukan oleh pihak Nofel dalam menyelesaikan konflik tersebut?
6. Apakah terdapat upaya atau intervensi dari Golkar tingkat pusat dalam menyelesaikan konflik tersebut? Dan bagaimana tanggapan mereka atas apa yang terjadi pada Golkar tingkat Kota Bekasi?

7. Dengan adanya dua kubu dalam internal Golkar Kota Bekasi. Mengapa anda memilih untuk bergabung ke dalam kepengurusan yang diketuai oleh Bpk. Nofel Saleh?



Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Nama	: Ibu Anneke Septivone
Jabatan/Instansi	: Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar Kota Bekasi
Hari/Tanggal	: Rabu, 14 Desember 2022
Pukul	: 11.45-13.00WIB

1. Apa yang mendorong Bpk. Nofel Saleh menyalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi? Dan bagaimana tanggapan dari internal partai itu sendiri?

**Jawaban:**

Jadi Nofel sudah di Golkar sejak kepengurusan Abu Rizal Bakrie, berarti sudah lebih dari 10 tahun. Dia ada di kepengurusan DPP Partai Golkar. Tidak ada aturan yang melarang pengurus pusat untuk menjadi ketua di daerah manapun, karena isu yang beredar kalau Nofel tidak bisa menjadi Ketua DPD karna dia gak pernah menjadi ABCD. Awalnya bukan Nofel yang mau, Memang Nofel diminta oleh banyak pihak untuk memimpin Golkar Kota Bekasi. Bukan tiba-tiba Nofel berambisi, cuman beriringnya waktu ada beberapa perubahan-perubahan, ada beberapa yang berbeda pendapat. Kenapa? Karena mereka menganggap yang layak di Kota Bekasi, salah satunya Nofel. Dia secara finansial mampu, dia gak mungkin cari uang dalam partai.

2. Seperti kita ketahui bahwa terdapat dua calon dalam pemilihan Ketua Umum Golkar Kota Bekasi, sehingga menjadikan dua kubu. Sejak kapan terciptanya dua kubu tersebut? Dan bagaimana awal mulanya?

**Jawaban:**

Gak ada dua kubu, namanya Golkar ya satu Golkar. Bukan kubu-kubuan ya cuman beda pendapat doang, terserah mereka bahasanya seperti apa. Di keluarga besar Golkar, ya mungkin di belakang tapi ngobrol biasa. Tapi kalau untuk kubu-kubuan, saya sih gak merasa ya tapi mungkin ada oknum-oknum yang merasa seperti itu, biarin aja. Mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang takut jabatannya hilang, kan itu biasa. Karena Nofel merangkul semuanya kok dan semua dukung Nofel, cuman karna ada satu dan lain hal, munculah nama lain.

3. Apa yang melatarbelakangi terselenggaranya dua kali Musda V di tempat yang berbeda?

**Jawaban:**

Pada pembukaan ada beberapa pihak yang tidak diizinkan masuk, yang sebenarnya dia punya hak untuk ke dalam arena Musda. Kamu bisa lihat di Youtube dokumentasinya banyak itu. Nah karena demi kondusivitas, agar tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan. Akhirnya ada perwakilan tim verifikasi dari Jawa Barat dan beberapa panitia mengadakan rapat kecil, memutuskan untuk kita pindah aja ke Hotel Horison.



4. Bagaimana jalannya Musda V di Hotel Horison? Dan bukti seperti apa yang mendukung kevaliditas kepemimpinan Bpk. Nofel Saleh sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi?

**Jawaban:**

Di Musda Hotel Horison, ada perwakilan Jawa Barat dan ada Plt Ketua DPD nya, semua unsur itu terpenuhi. Ada PK yang memang sudah disahkan oleh Mahkamah Partai, karena PK-PK yang sebelumnya masa berlakunya sudah kadaluarsa. Untuk buktinya ada data-data administratif yang sudah diserahkan kepada Mahkamah Partai.

5. Pasca Musda V, langkah seperti apa yang akan maupun sudah dilakukan oleh pihak Nofel dalam menyelesaikan konflik tersebut?

**Jawaban:**

Kita tunggu keputusan dari Mahkamah Partai, karena ini bersengketa dan masih dalam proses jadi kita tunggu. Karena keputusan di pengadilan itu NO, yaitu pengadilan tidak memutuskan memenangkan Nofel sebagai ketua atau Ade sebagai ketua. Pengadilan memutuskan bahwa itu dikembalikan ke partai.

6. Apakah terdapat upaya atau intervensi dari Golkar tingkat pusat dalam menyelesaikan konflik tersebut? Dan bagaimana tanggapan mereka atas apa yang terjadi pada Golkar tingkat Kota Bekasi?

**Jawaban:**

Gak sih, karnakan ada uji materiil jadi kita tunggu itu. Menyerahkan semua ke Mahkamah Partai.

7. Dengan adanya dua kubu dalam internal Golkar Kota Bekasi. Mengapa anda memilih untuk bergabung ke dalam kepengurusan yang diketuai oleh Bpk. Nofel Saleh?

**Jawaban:**

Banyak orang yang merasa dibantu karena Nofel apalagi dia masih muda jadi kalau maju ya terus maju. Apalagi dia maju bukan untuk kepentingan Nofel, ini udah kepentingan orang banyak tapi takut ngomong, terus logikanya SK nya udah habis jadi ngapain? Itukan logika sederhananya.



## B. Kubu Ade Puspitasari

Nama	: Bapak Sukamto, S.IP
Jabatan/Instansi	: Wakil Ketua Bidang Kerohanian Partai Golkar Kota Bekasi
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 Januari 2023
Pukul	: 14.00-15.30WIB

1. Apa yang mendorong Ibu Ade Puspitasari menyalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi? Dan bagaimana tanggapan dari internal partai itu sendiri?
2. Seperti kita ketahui bahwa terdapat dua calon dalam pemilihan Ketua Umum Golkar Kota Bekasi, sehingga menjadikan dua kubu. Sejak kapan terciptanya dua kubu tersebut? Dan bagaimana awal mulanya?
3. Apakah pihak Ibu Ade mengetahui Musda V dilaksanakan dua kali dengan tempat yang berbeda?
4. Bagaimana jalannya Musda V di Graha Bintang? Dan bukti seperti apa yang mendukung kevaliditas kepemimpinan Ibu Ade sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi?
5. Berdasarkan sumber beredar, bahwa adanya gugatan ke Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Bagaimana jalannya persidangan saat itu? Dan bagaimana respon dari pihak Ibu Ade?
6. Apakah terdapat upaya atau intervensi dari Golkar tingkat pusat dalam menyelesaikan konflik tersebut? Dan bagaimana tanggapan mereka atas apa yang terjadi pada Golkar tingkat Kota Bekasi?

7. Dengan adanya dua kubu dalam internal Golkar Kota Bekasi. Mengapa anda memilih untuk bergabung ke dalam kepengurusan yang diketuai oleh Ibu Ade?



*Hasil Wawancara dan Dokumentasi*

Nama	: Bapak Sukamto, S.IP
Jabatan/Instansi	: Wakil Ketua Bidang Kerohanian Partai Golkar Kota Bekasi
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 Januari 2023
Pukul	: 14.00-15.30 WIB

1. Apa yang mendorong Ibu Ade Puspitasari menyalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi? Dan bagaimana tanggapan dari internal partai itu sendiri?

**Jawaban:**

Berakhirnya masa jabatan Rahmat Effendi, di akhir Agustus 2020. Pada tanggal 1 September terbitlah, Plt DPD dari Jawa Barat yang memberi jabatan Plt kepada Ade Puspitasari selama tiga bulan. Kenapa Ade? Satu, dia adalah pengurus DDP Golkar Provinsi Jawa Barat, kalau gak salah posisinya wakil bendahara. Yang kedua dia adalah representasi rakyat Bekasi dan Depok dari Partai Golkar, sehingga kalau ada aspirasikan lebih cepat.

2. Seperti kita ketahui bahwa terdapat dua calon dalam pemilihan Ketua Umum Golkar Kota Bekasi, sehingga menjadikan dua kubu. Sejak kapan terciptanya dua kubu tersebut? Dan bagaimana awal mulanya?

**Jawaban:**

Penyalonan Ade sudah dari Agustus 2020 dan kubu sebelahnya sudah dari sebelumnya. Emang gagalnya Musda karena siapa? Ya karena

Nofel. Itulah permainan mereka di pusat dan harus diakui luar biasa dia juga, artinya kiprahnya luar biasa, dia bisa main di pusat. Sedangkan pusat gak mau melihat ke bawah seperti apa, kondisinya seperti apa. Saya pada prinsipnya itu, silakan saja siapapun untuk berkeinginan mendaftarkan diri sebagai ketua DPD. Sepanjang aturan dan mekanismenya dipenuhi. Nofel ijazahnya aja gak jelas! Bagaimana? Dia tidak melewati setiap tahapan penjaringan. Dia memang pas Musda 2020, dia daftar juga, cuman gak memenuhi syarat. Soal ijazahnya tadi, yang S1. Nah kalau kita tahu, terus kita lolosin aja, apa kata kader? Apa kata rakyat nanti? Golkar pimpinannya abal-abal? Saya gak mau, saya jaga itu. Pribadi gak ada masalah, Nofel juga bagus. Tetapi penuhinlah mekanisme tersebut.

3. Apakah pihak Ibu Ade mengetahui Musda V dilaksanakan dua kali dengan tempat yang berbeda?

**Jawaban:**

Sementara PK-PK yang di blok sana, saya pribadi setelah acara pembukaan itu saya ketemu. Dari Ketua PK Jati Sampurna, PK Pondok Melati, PK Rawalumbu, PK Mustika Jaya. Saya ketemu tuh empat-empatnya dan sempat ngobrol. Saya tanya, “kenapa ente di luar aja?”

“kan lagi *break*, mas”

“ente punya hak suara loh, ente udah buat mandat?”

“lah saya gak dikasih mandat”

“loh kok gak dikasih mandat? Ente ini Ketua PK, punya otoritas untuk mengeluarkan mandat kepada siapa yang ente suruh atau ente memandatkan diri juga boleh. Yaudah sekarang buat aja! Kehilangan suara nanti”

Akhirnya gak bikin, dia malah ikut Musda di situ. Pada saat itu, saya gak tahu sama sekali kalau bakal ada dua kali Musda, karena saya berpikir kalau ada Musda pasti itu abal-abal. Kepanitiaannya siapa? Gak jelas. SK nya mana? Panitia harus yang ada SK nya, kalau gak ada ya gak mau kerja.

4. Bagaimana jalannya Musda V di Graha Bintang? Dan bukti seperti apa yang mendukung kevaliditas kepemimpinan Ibu Ade sebagai Ketua Umum Golkar Kota Bekasi?

**Jawaban:**

Musda digelar sesuai dengan aturan, acara pembukaan dihadiri oleh seluruh Ketua dan Sekretaris Partai di Kota Bekasi, dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Kepala Daerah sekaligus Pembina partai politik. Dihadiri oleh perangkat DPD, apa saja? Pengurus DPD, Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, ada Hasta Karya tuh ada dua Tri Karya dan Panca Karya, dan paling banyak memiliki suara PK setiap kecamatan. Dari 12 PK ada 7 yang hadir, yang 5-kelompok dia. Nah dari 18 punya hak suara, pokoknya Ade dapet 11 suara artinya 50%+2.

Kubu sebelah bukannya gak boleh masuk, yang masuk ke ruang sidang itu mereka yang memegang mandat ataupun panitia. Dia memegang mandat gak? Ya kalau dia gak memegang mandat ngapain dia masuk ke ruang Musda, gak boleh dong. Terus masalah Covid, semuanya terbatas. Satgas Covid kan ada disitu, saat itu juga lagi kenceng-kencengnya Covid, jadi semua harus tertib dan sebagainya. Kemudian untuk mengantisipasi kejadian terjadinya keributan, saya gak mau Musda diambil alih provinsi dan saya gak mau orang-orang saya terpancing emosi. Merekakan sengaja buat rebut, biar apa? Biar provinsi memiliki kewenangan mengambil alih Musda dan bisa digagalkan lagi. Kita gak mau, kita udah lelah. Saya patuh ke partai kepada Golkar, bukan orang per orang. Supaya partai ini bisa berjalan dengan baik dan Golkar udah ketinggalan jauh dengan partai lain, Golkar Musda kota aja baru jalan, udah kelewat, kalah *start dong*. Makanya kita kejar target setelah Musda ini.

5. Berdasarkan sumber beredar, bahwa adanya gugatan ke Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Bagaimana jalannya persidangan saat itu? Dan bagaimana respon dari pihak Ibu Ade?

**Jawaban:**

Pada sidang di Mahkamah Partai, saya hajar habis. Mahkamah Partai itu sidang abal-abal, ketentuan apa? Dia hanya menggugurkan kewajibannya. Mahkamah Partai sama dengan Undang-Undang Partai Politik, 60 hari perkara itu harus putus kalau gak putus itu gugur. Kita



udah terlambat dua tahun, ditambah gugatan dari Nofel ada aja di pengadilan, itukan menyerap energi dan gak mudah. Karena saya tahu persoalannya dan tahu persis permasalahannya, dari pra Musda sampai Musda, sayalah sebagai saksi di Pengadilan Negeri dan Mahkamah. Satu jam lebih saya diperiksa, ayo mau tanya apa? Saya jelasin apa adanya dan realitasnya seperti itu. Makanya kalau Nofel mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, ya gapapa silakan tapi seyogyanya selesaikan dulu di Mahkamah Partai secara internal. Nah kalau Mahkamah Partai sudah mengeluarkan keputusan, kemudian keputusan tersebut tidak memuaskan silakan ke PN. Lah ini malah kebalik. Ya memang dia ke Mahkamah Partai abis Musda, berartikan udah setahun berjalan, artinya perkara itu udah hangus demi hukum. Karena apa? Lebih dari 60 hari, kadaluarsa. Harusnya Nofel gabung atau gimana kek, atau ngobrol baik-baik. Nawaitu yang baik ajalah kalau emang mau besarin Golkar. Pengacaranya juga bukam orang Golkar, kalau DPD memang orang bagian hukum Golkar.

6. Apakah terdapat upaya atau intervensi dari Golkar tingkat pusat dalam menyelesaikan konflik tersebut? Dan bagaimana tanggapan mereka atas apa yang terjadi pada Golkar tingkat Kota Bekasi?

**Jawaban:**

Kita berpatokan pada SK dari provinsi Jawa Barat yang menyatakan pelaksanaan Musda Kota Bekasi di Graha Bintang. Tidak ada upaya dari pusat untuk mendamaikan. Tapi yang jelas, kami DPD berusaha

untuk memberikan bukti kesungguhan bahwa kami mengurus partai gak main-main, artinya bahwa segala sesuatu kita jalani dengan konsekuensi yang ada.

7. Dengan adanya dua kubu dalam internal Golkar Kota Bekasi. Mengapa anda memilih untuk bergabung ke dalam kepengurusan yang diketuai oleh Ibu Ade?

**Jawaban:**

Kami bukan orang-orang yang setia kepada Bapak Rahmat Effendi, tetapi bagaimana kita menyelamatkan Golkar ini, harus ditangani orang-orang yang memahami Golkar. Yang tahu persis Golkar. Nofel siapa? Gak ada yang kenal kok. Saya pribadi aja gak kenal, sampai hari ini saya gak kenal dan Nofel seperti apa orangnya. Luar biasakan? udah mengaku Ketua DPD.



### C. Dewan Pakar Partai Golkar

Nama	: Bapak Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si.
Jabatan/Instansi	: Sekretaris Dewan Pakar Partai Golongan Karya
Hari/Tanggal	: Jumat, 20 Januari 2023
Pukul	13.00-14.00 WIB

1. Apakah Golkar Pusat mengetahui konflik dualisme kepemimpinan DPD di Kota Bekasi? Dan bagaimana responnya terhadap hal tersebut?
2. Berdasarkan Juklak No.2 Tahun 2020 pasal 6, Musda tingkat kota/kabupaten dilaksanakan selambat-lambat 6 bulan setelah MUNAS. Awalnya Musda Golkar Kota Bekasi direncanakan pada tanggal 5 Agustus 2020, akan tetapi terdapat surat dari DPP yang ditujukan kepada DPD Prov. Jawa Barat dengan tembusan DPD Kota Bekasi untuk menunda penyelenggaraan Musda V DPD Kota Bekasi atas rekomendasi Mahkamah Partai. Sebenarnya bagaimana kedudukan antara DPP dengan Mahkamah Partai?
3. Berbagai contoh yang telah terjadi, memperlihatkan timbulnya “ambiguitas” diakibatkan dari statement atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus DPD tingkat provinsi. Bagaimana respon bapak sebagai Dewan Pakar terkait hal tersebut?
4. Kasus dualisme Golkar Kota Bekasi dari tahun 2021 sampai saat ini masih belum diselesaikan, sedangkan putusan dalam Pengadilan Negeri Kota Bekasi sudah ada. Apakah persidangan Mahkamah Partai memang membutuhkan banyak waktu? Dan kira-kira apa penyebabnya?

5. Kasus-kasus konflik internal yang terjadi, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sebagainya. Apakah DPP Golkar memiliki hak intervensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan bagaimana bentuk kepedulian kepengurusan pusat terhadap kepengurusan tingkat di bawahnya?



*Hasil Wawancara dan Dokumentasi*

Nama	: Bapak Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si.
Jabatan/Instansi	: Sekretaris Dewan Pakar Partai Golongan Karya
Hari/Tanggal	: Jumat, 20 Januari 2023
Pukul	13.00-14.0 WIB

1. Apakah Golkar Pusat mengetahui konflik dualisme kepemimpinan DPD di Kota Bekasi?

**Jawaban:**

Dimulai dari DPD Provinsi maupun DPP pasti mengetahui, karena ketika diselenggarakan sebuah Musda. Musda merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah masing-masing, pasti peserta Musda itu adalah unsur kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya. Di dalam Musda itu, DPD Provinsi pasti menjadi peserta di situ dan demikian pasti tahu terjadinya konflik itu. Itu adalah prosedur yang biasa. Begitu pula DPP pasti tahu dengan sendirinya karena mendapatkan laporan dari provinsi. Kemudian di DPP itu juga ada institusi Korwil atau Koordinator Wilayah. Setiap pengurus DPD Partai Golkar itu masuk institusi namanya Koordinator Wilayah. Nah dalam hal Kota Bekasi, Korwilnya itu meliputi wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat. Lalu anggota Korwil yang terdiri dari DPP, membagikan diri ke dalam wilayah-wilayah tertentu yang ada di Jawa Barat. Tugas Korwil adalah memantau pelaksanaan itu, jadi pasti DPP tahu gak mungkin gak tahu, karena dua alasan. Pertama mekanisme Musda, yang

sudah dijelaskan dan yang kedua melalui mekanisme Korwil yang merupakan tugas rutin daripada Korwil serta bidang organisasi.

2. Berdasarkan Juklak No.2 Tahun 2020 pasal 6, Musda tingkat kota/kabupaten dilaksanakan selambat-lambat 6 bulan setelah MUNAS.

Awalnya Musda Golkar Kota Bekasi direncanakan pada tanggal 5 Agustus 2020, akan tetapi terdapat surat dari DPP yang ditujukan kepada DPD Prov. Jawa Barat dengan tembusan DPD Kota Bekasi untuk menunda penyelenggaraan Musda V DPD Kota Bekasi atas rekomendasi Mahkamah Partai. Sebenarnya bagaimana kedudukan dari Mahkamah Partai?

**Jawaban:**

Soal kantor partai itu memang urusan Pengadilan Negeri, karena itu menyangkut perdata tentang siapa pemilik daripada bangunan itu dan tunduk kepada Kitab Undang-Undang Perdata. Adapun mengenai Mahkamah Partai mengeluarkan rekomendasi, sebetulnya saya kurang tahu jadi perlu ditelusuri. Alasan Mahkamah Partai merekomendasi tentu ada dasarnya, misalnya laporan atau masukan dan sebagainya, hingga akhirnya untuk menjaga kestabilan partai dan menjaga aset partai karena ini menyangkut aset loh ini. Karena pemilik dari aset kantor partai sesungguhnya DPP, bukan DPD nya. Jadi harus udah ada izin dari DPP, itu ada aturan di kebhendahaan. Tapi intinya, aset partai adalah kendali dari DPP, ada daftar kekayaan DPP termasuk gedung-gedung partai. Nah mungkin dalam rangka menyelamatkan aset partai

itulah sehingga perlu *dipending*, tapi ini dugaan saya agar tidak menimbulkan perebutan, karena perebutan kepengurusannya ujung-ujungnya siapa yang berhak atas kantor itu. Dan Pepen janji mengembalikan lagi, tapi ada dua kantor. Jadi mungkin itu latar belakang dari Mahkamah Partai mengeluarkan itu. Tentu sikap dari Mahkamah Partai itu harus berdasarkan kepentingan banyak orang, tidak boleh kepentingan salah satu pihak. Nah dalam hal ini, nampaknya Mahkamah Partai ingin berusaha juga menyelamatkan aset partai, setelah itu dikeluarkan rekomendasi.

Secara kedudukan, Mahkamah Partai sesungguhnya adalah suatu pengadilan biasa dalam artian dia pengadilan yang bebas dan merdeka, secara konseptual dan filosofis begitu demikian. Jadi Mahkamah Partai menerima *delegation of authority* sebagai Mahkamah Partai dari Undang-Undang Partai Politik, kemudian Undang-Undang ini mendapat delegasi kekuasaan dari Undang-Undang Dasar yang mengenai pemilu, pemilihan legislatif, dan peserta pemilu legislatif, pada pasal 22 E ayat 3-kan itu Partai Politik, di situ masuknya. Sehingga semestinya sebagai Badan Pengadilan, Mahkamah Partai itu bebas dan otonom.

3. Berbagai contoh yang telah terjadi, memperlihatkan timbulnya “ambiguitas” diakibatkan dari statement atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus DPD tingkat provinsi. Bagaimana respon bapak sebagai Dewan Pakar terkait hal tersebut?

**Jawaban:**

Harusnya kita tunduk kepada Mahkamah Partai, kalau kita masih percaya kepada Mahkamah Partai, kecuali kalau udah gak percaya itu beda lagi. Kadang-kadang politik begitu, memang hukum itu adalah bentuk tertinggi dari kesepakatan politik tetapi ketika sudah menjadi hukum, proses politik berlangsung harus berdasarkan hukum. Itulah yang dinamakan taat kepada konstitusi, kalau pada partai kepada AD/ART Partai. Seharusnya tunduk kepada Mahkamah Partai, gak bisa tuh dengan memilih salah satu tetapi-kah tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Makanya DPD dapat membentuk Plt, mengambil alih itu semua yaitu pelaksana tugas harus satu tingkat di atasnya. Nah provinsi minimal setingkat, kalau perlu DPP. Nah dia menjadi Plt Ketua dan Plt Sekretaris, nanti baru melengkapi kepengurusannya, sambil menunggu penyelesaian dari Mahkamah Partai. Seharusnya seperti itu yang dilakukan. dibentuk Plt, diambil alih, lalu konfliknya diselesaikan di Mahkamah Partai. Jadi yang berkonflik silakan diselesaikan, tetapi partai tidak boleh kosong, kehidupan harus berjalan. Nah semestinya gak serta merta seperti itu, seharusnya diambil alih oleh Plt minimal satu tingkat di atasnya.

4. Kasus dualisme Golkar Kota Bekasi dari tahun 2021 sampai saat ini masih belum diselesaikan, sedangkan putusan dalam Pengadilan Negeri Kota Bekasi sudah ada. Apakah persidangan Mahkamah Partai memang membutuhkan banyak waktu? Dan kira-kira apa penyebabnya?



**Jawaban:**

Kadang-kadang ada juga orang yang menikmati, maaf ya ini. Ada juga oknum-oknum yang menikmati karena konflik itu. Ya karena kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis dan penyelesaian pengadilan panjang, tahu sendirilah gak ada makan siang gratis. Jadi dalam kutip diduga bisa saja terjadi transaksional-transaksional tertentu. Tetapi ketika ada putusan Mahkamah Partai yang dirasa tidak adil, maka seseorang itu dapat memindahkan pengadilan itu, yaitu Pengadilan Negeri. Menurut saya, pusat itu tidak tegas. Dalam arti, dalam tanda kutip ada unsur membiarkan berlangsung berlama-lama, saya gak ngerti maksudnya apa. Untuk partai berpengalaman Golkar itu masalah kecil, tingkat kota lagi. Masa gak bisa diselesaikan sih? Begitu banyak orang pintar di Golkar, saya gak percaya itu gak bisa diselesaikan. Pertanyaannya ada gak niatan untuk menyelesaikan. Jangan-jangan ada pihak-pihak yang menikmati keadaan ini.

5. Kasus-kasus konflik internal yang terjadi, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sebagainya. Apakah DPP Golkar memiliki hak intervensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan bagaimana bentuk kepedulian kepengurusan pusat terhadap kepengurusan tingkat di bawahnya?

**Jawaban:**

Sebenarnya partai memiliki mekanisme penyelesaian terhadap dualisme itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang merupakan

perubahan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di pasal 32, dijelaskan tentang mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik. Tiap-tiap partai dapat membentuk namanya institusi Mahkamah Partai yang merupakan badan otonom yang dibentuk oleh partai atas perintah dari Undang-Undang Partai Politik. Hakimnya ada, hakimnya ya dari kader-kader partai politik masing-masing dan tidak boleh rangkap jabatan. Dia hanya boleh menjadi hakim, tidak boleh menjabat sebagai pengurus DPP, baik tingkat pusat maupun daerahnya. Mereka inilah yang diberikan tugas untuk menyelesaikan, tetapi dapat berperan dan masuk ke dalam arena apabila terdapat pengaduan, gak bisa gak ada pengaduan terus tiba-tiba masuk. Negara menyediakan forum itu melalui Undang-Undang Partai Politik yang memerintahkan setiap partai memiliki Mahkamah Partai. Sangat besar pengaruh intervensi pusat, DPP itukan ke bawah hubungannya komando ketika sudah menjadi struktural partai. DPP sebenarnya bisa menginisiasi membentuk tim rekonsiliasi untuk menentukan langkah-langkah organisasi, termasuk yang berkonflik harus memiliki kebesaran hati juga, jangan hanya memikirkan diri sendiri.



# SKRIPSI AFI

## ORIGINALITY REPORT

**11** %

SIMILARITY INDEX

**10** %

INTERNET SOURCES

**3** %

PUBLICATIONS

**1** %

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ejournal.politik.lipi.go.id">ejournal.politik.lipi.go.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<a href="http://anakipsa.wordpress.com">anakipsa.wordpress.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<a href="http://m.tribunnews.com">m.tribunnews.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="http://rri.co.id">rri.co.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	Meutya Viada Hafid. "Konsensus Politik pada Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016", Jurnal Penelitian Politik, 2018 Publication	<b>1</b> %
<b>7</b>	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="http://ejournal.umm.ac.id">ejournal.umm.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %

[makalahme02.blogspot.com](http://makalahme02.blogspot.com)